

ABSTRAK

Penyakit kusta merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang mendapat perhatian serius dalam sistem pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Di Jawa, sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kusta tidak hanya dipandang sebagai ancaman medis, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang dianggap mengganggu tatanan masyarakat kolonial. Menanggapi penyebaran penyakit ini, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan isolasi ketat terhadap para penderita. Namun, pendekatan tersebut menimbulkan berbagai persoalan etis dan sosial, terutama terkait dengan penguatan stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan kebijakan pengendalian kusta pada masa kolonial serta peran aktor lokal, khususnya Dr. J.B. Sitanala, dalam mendorong perubahan pendekatan yang lebih manusiawi. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melalui tahapan-tahapan penelitian sejarah, mulai dari heuristik hingga interpretasi, dengan menggunakan sumber-sumber sezaman seperti laporan resmi, peraturan kesehatan, surat kabar, serta dokumen pribadi yang berkaitan dengan tokoh medis bumiputera. Analisis dilakukan secara kronologis dan tematis untuk menelusuri dinamika kebijakan, sosial, dan medis yang berkembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan isolasi yang diterapkan pemerintah kolonial tidak efektif dalam menekan penyebaran penyakit dan justru memperkuat pengucilan sosial terhadap penderita. Sebagai alternatif, pendekatan rawat jalan yang dikembangkan oleh Dr. Sitanala, yang menekankan pada deteksi dini, perawatan terbuka, dan rehabilitasi sosial, terbukti lebih efektif dan manusiawi. Temuan ini menegaskan pentingnya kontribusi aktor lokal dalam reformasi kebijakan kesehatan kolonial serta menunjukkan relevansi kajian sejarah medis dalam memahami fondasi sistem kesehatan masa kini.

Kata kunci: penyakit kusta, kebijakan kolonial, isolasi, Dr. Sitanala

ABSTRACT

Leprosy was one of the major public health problems that received serious attention under the colonial government of the Dutch East Indies. In Java, from the late nineteenth century to the early twentieth century, leprosy was regarded not only as a medical threat but also as a social issue that was considered to disrupt the structure of colonial society. In response to the spread of the disease, the colonial government implemented strict isolation policies for people affected by leprosy. However, this approach gave rise to various ethical and social problems, particularly in reinforcing stigma and discrimination against leprosy patients.

This study aims to examine the development of leprosy control policies during the colonial period and the role of local actors, especially Dr. J. B. Sitanala, in promoting a more humane approach. The method used is historical research with a qualitative approach. The research follows the stages of historical study, from source collection to interpretation, using contemporary sources such as official reports, health regulations, newspapers, and personal documents related to indigenous medical figures. The analysis is carried out both chronologically and thematically to trace the dynamics of policy, society, and medicine during the period.

The findings show that the isolation policy implemented by the colonial government was ineffective in reducing the transmission of the disease and instead reinforced the social exclusion of those affected. As an alternative, the outpatient treatment approach developed by Dr. Sitanala, which focused on early detection, open care, and social rehabilitation, proved to be more effective and humane. These findings emphasize the importance of local actors in the reform of colonial health policy and highlight the relevance of historical medical studies in understanding the foundations of present-day health systems.

Keywords: leprosy, colonial policy, isolation, Dr. Sitanala